

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA HUMENE KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI

Fitri Yanna Zega ^{*1}
Azamris Chanra ²
Yurisna Tanjung ³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*e-mail: fitriyanazega@gmail.com¹, azamrischanra@gmail.com², yurisnatanjung@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berjudul pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam meningkatkan pembangunan masyarakat Desa Humene, hal yang melatar belakangi memilih judul ini dikarenakan Desa Humene terbelang masyarakat kurang sejahtera yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan. Desa Humene merupakan daerah pinggiran pantai dan berpenduduk mayoritas beragama islam, Desa Humene juga penerima manfaat dari pemerintah salah satunya dari Kementrian Sosial pada Program Keluarga Harapan – Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan potensi masing- masing keluarga miskin.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keberadaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat desa bagi keluarga miskin.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menyajikan suatu gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial serta hubungan sosial (Neuman:2006). Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari kelompok usaha bersama, pendamping dan kepala desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian tentang keberadaan kelompok usaha bersama bahwa benar telah terbentuknya kelompok usaha bersama pada tahun 2015, namun saat ini usaha yang dilakukan memiliki kendala yang menghambat perkembangan usaha. Modal yang diberikan tidak mencukupi jika usaha terus dijalankan, sedangkan hasil yang didapat hanya mampu memenuhi biaya lauk pauk sehari- harinya. Salah satu kelompok telah berganti usaha yakni simpan pinjam yang pada awalnya bertani dikarenakan gagalnya bertani. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan kondisi nyata lapangan.

Kata Kunci : Pelayanan kesejahteraan sosial, keluarga miskin, pembangunan masyarakat desa

Abstract

This research is entitled social welfare services for poor families in improving the development of the Humene Village community. The background for choosing this title is because Humene Village is considered a less prosperous community with the majority of its population earning a living as fishermen. Humene Village is a coastal area and has a majority Muslim population. Humene Village is also a recipient of benefits from the government, one of which is from the Ministry of Social Affairs for the Family Hope Program - Joint Business Groups (KUBE) through the Social Service which aims to alleviate poverty according to the potential of each family. poor.

The aim of this research is to describe the existence of the Joint Business Group (KUBE) program in Humene Village, Gunungsitoli Idenoi District in an effort to improve village community development for poor families. The research method used is descriptive qualitative, namely presenting a picture of a situation, social background and social relationships (Neuman: 2006). The informants in this research were 5 people consisting of joint business groups, assistants and village heads. Data collection techniques are carried out through documentation, observation and interviews.

The results of research on the existence of joint business groups show that it is true that joint business groups were formed in 2015, but currently the business being carried out has obstacles that hinder business development. The capital provided is insufficient if the business continues to run, while the results obtained are only able to cover the daily costs of side dishes. One of the groups has changed business, namely savings and loans, which was originally farming due to failure in farming. This can be concluded based on real conditions in the field.

Keywords: Social welfare services, poor families, village community development

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat yang saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, melihat pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan maka perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan fakir miskin atau kemiskinan di Negeri ini.

Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturachman, dkk).

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK).

Artinya Garis Kemiskinan adalah standar jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan (setara dengan 2.100 kalori perkapita perhari) dan kebutuhan pokok non makanan. Data BPS publikasi terakhir september tahun 2015 menunjukkan garis kemiskinan (perkapita/perbulan) untuk tingkat nasional sebesar Rp. 344.809, Sumatera Utara Rp. 366.137, dan Kota Gunungsitoli Rp. 293.802.

Data diatas sebagai contoh jika seorang penduduk Kota Gunungsitoli tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan) sebesar Rp. 289.428 dalam satu bulan, maka orang tersebut tergolong berada di bawah garis kemiskinan atau orang miskin.

Kota Gunungsitoli berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang No. 47 tahun 2008 terdiri dari 6 kecamatan, 98 desa dan 3 kelurahan, dengan luas wilayah 469,36 km² (0,38 % dari luas Provinsi Sumut) terdiri dari 27 % wilayah terletak di sekitar pesisir dan 73 % di daerah perbukitan. Menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah penduduk Kota Gunungsitoli sebanyak 135.995 jiwa dan Jumlah penduduk Kecamatan Idanoi Tahun 2015 sebanyak 23.147 jiwa serta jumlah penduduk di Desa Humene sebanyak 405 jiwa. Jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli pada tahun 2010 sebanyak (33,87 %), tahun 2011 (32,12 %), dan tahun 2012 (30,84 %), tahun 2013 (30,94%), Tahun 2014 (27,63%), Tahun 2015 (25,24%) Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun tidak menunjukkan angka yang signifikan.

Pertumbuhan penduduk di Kota Gunungsitoli selain disebabkan oleh angka kelahiran, juga disebabkan oleh bertambahnya perpindahan penduduk dari luar Kota Gunungsitoli sebagai kontributor terbesar, terutama masyarakat urban yang mengadu nasib di Gunungsitoli, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena kaum miskin kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan peran yang lebih maksimal dari Negara melalui pemerintah daerah untuk dapat membuat berbagai kebijakan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun Penanggulangan kemiskinan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50 /PEGHUK/2002 tentang penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Menteri Sosial yakni melalui program-program sosial yang merupakan kemiskinan salah satu bagian dari peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan pelayanan kesejahteraan sosial seperti Biaya Langsung Tunai (BLT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan-Kelompok Usaha Bersama (PKH-KUBE), dan Rumah Layak Huni yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga miskin.

Program Pelayanan Sosial diatas telah dimiliki salah satu Desa Humene di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang menunjang pembangunan masyarakat desa. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin, peneliti tertarik pada Program Keluarga Harapan yakni Program Kelompok Usaha Bersama.

Program ini merupakan turunan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melakukan kegiatan-kegiatan terobosan dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Usaha Ekonomi Produktif sesuai dengan potensi masing-masing masyarakat miskin. Untuk itu, Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Salah satu programnya adalah Program KUBE melalui Bantuan Langsung.

Penanganan kemiskinan dengan pendekatan optimalisasi potensi ekonomi produktif keluarga miskin yang dilakukan pemerintah Kota Gunungsitoli dalam bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama atau usaha produktif.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE, keluarga miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang serta dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya untuk peningkatan pendapatan.

Kelompok Usaha Bersama bagi keluarga miskin dapat mendukung peningkatan pembangunan masyarakat desa salah satunya adalah Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Desa Humene adalah desa berpenduduk mayoritas Muslim. Terletak di pinggir pantai sebelah selatan Kota Gunungsitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara dan masih dalam wilayah Kota Gunungsitoli.

Desa Humene masuk dalam wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, sebuah Kecamatan yang baru dimekarkan, yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Gido. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian kecil yang bekerja di Instansi Pemerintah, Guru, Pedagang dan Wiraswasta. Taraf perekonomianpun terbilang kurang sejahtera karena hanya mengandalkan laut tanpa memiliki pekerjaan sampingan, dan para wanitanya cenderung berstatus ibu rumah tangga.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini akan melakukan studi literatur, wawancara dan observasi kepada informan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menelaah seluruh data

yang tersedia dari berbagai sumber. Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Humene, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan/ Profesi	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	34	21,79%
2	Nelayan	55	35,25%
3	Wiraswasta	38	24,35%
4	Karyawan Honorer/Swasta	15	9,61%
5	Pedagang	1	0,64%
6	Buruh	1	0,64%
7	PNS	10	6,41%
8	TNI	1	0,64%
9	Sopir	1	0,64%
	Jumlah	156	99,97=100%

Berdasarkan data diatas dapat dikemukakan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Humene adalah Pekerjaan Nelayan dengan nilai angka persentase 35,25% yang dimana Desa Humene ini merupakan daerah pinggir pantai atau daerah pesisir.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan potensi perekonomian dalam suatu daerah sehingga mendukung kemajuan bangsa pula. Untuk memenuhi kebutuhan suatu pendidikan, maka harus di lalui dari jenjang dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi, dengan begitu suatu pendidikan tersebut akan melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas sebagai tenaga kerja.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Sekolah	Tamatan	Persentase (%)
TK/RA	30	9,06%
SD	96	29%
SMP/SLTP	59	17,82%
SMA/SMK/SLTA	91	27,49%
PERGURUAN TINGGI	21	6,34%
TIDAK SEKOLAH	34	10,27%
Jumlah	331	99,98=100%

Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai angka persentase pendidikan di Desa Humene tertinggi yakni tingkat pendidikan dasar dengan jumlah 29% dan paling rendah adalah tingkat

perguruan tinggi dengan jumlah 6,34%. Data diatas yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi hanya dari keluarga yang perekonomiannya mencukupi.

Tinjauan data diatas penduduk Desa Humene yang tidak sekolah memiliki nilai angka persentase 10,27% , hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan perangkat desa karena pendidikan adalah salah satu jalan utama dalam merubah perekonomian dan derajat manusia.

Tabel 3. Jumlah Sarana ibadah di Desa Humene Tahun 2016

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mushola As-Salihin	1
2	Masjid Jami' Humene	1
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	2

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sarana ibadah di Desa Humene adalah memiliki 1 Masjid dan 1 Mushola yang telah dibangun di Desa tersebut menunjukkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Humene mayoritas beragama islam.

Tabel 3. Distribusi Narasumber Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Desa Humene

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
1	Bunga Riahta Sitepu	Ketua	Perempuan	45 Tahun
2	Rosiana Bangun	Sekretaris	Perempuan	31 Tahun
3	Wardian	Bendahara	Perempuan	42 Tahun
4	Irhamna Tanjung	Anggota	Perempuan	37 Tahun
5	Nur Tasman Larosa	Anggota	Perempuan	35 Tahun
6	Saleha Gea	Anggota	Perempuan	45 Tahun
7	Samapati Larosa	Anggota	Perempuan	42 Tahun
8	Nur Asma Laoli	Anggota	Perempuan	41 Tahun
9	Yusnah Zega	Anggota	Perempuan	31 Tahun

Berdasarkan tabel diatas, peserta kelompok berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai ibu rumah tangga dengan usia dari 31-45 tahun. Adapun hasil wawancara peneliti dengan kelompok pada tanggal 25 februari 2017 pukul 10.00 Wib yaitu pengembangan usaha bertani telah dilaksanakan dari tahun 2015 hingga saat ini, namun berdasarkan pengamatan usaha bertani sudah tidak berjalan seperti semula dikarenakan adanya kendala yakni faktor cuaca yang tidak dapat ditentukan dan faktor lahan bertani yang tidak mendukung karena lingkungan pinggiran pantai. Kendala ini dapat diatasi selama 1 tahun, namun beberapa bulan terakhir kendala ini tak kunjung dapat diatasi yang membuahkan hasil tidak memuaskan.

Tabel 4. Distribusi Narasumber Kelompok Usaha Bersama Sentosa Desa Humene

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
1	Adimina Waruwu	Ketua	Perempuan	42 Tahun
2	Yusmeri Lubis	Sekretaris	Perempuan	33 Tahun
3	Viky Hidayati Zega	Bendahara	Perempuan	35 Tahun
4	Sry Muliani Tanjung	Anggota	Perempuan	45 Tahun
5	Mawarniat Kurinci	Anggota	Perempuan	42 Tahun
6	Asnidar Gulo	Anggota	Perempuan	46 Tahun
7	Yurlina Aceh	Anggota	Perempuan	41 Tahun
8	Sumarni Zega	Anggota	Perempuan	37 Tahun

Berdasarkan tabel diatas, peserta kelompok berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai ibu rumah tangga dengan usia dari 33-46 tahun. Adapun hasil wawancara peneliti dengan kelompok pada tanggal 26 februari 2017 pukul 10.00 Wib yaitu adanya manfaat yang dirasakan, dengan memberikan kepuasan batin walaupun tidak secara materi karena proses pengembangan usaha dilakukan secara berkelompok sehingga terjalinnya hubungan pertemanan yang baik dengan keluarga 1 dan lainnya. Manfaat lainnya adalah bertambahnya pengalaman dalam berkebun yang pada dasarnya latar belakang peserta kelompok tidak berstatus sebagai petani unguap ketua kube sentosa.

Kelompok usaha bersama yang dicanangkan oleh Kementrian Sosial pada Program Keluarga Harapan dan ditanggung jawabkan oleh Dinas Sosial bertujuan agar program ini dapat membantu perekonomian keluarga serta mengatasi kemiskinan, yang dimana program ini bersifat tidak hanya sementara namun berkesinambungan sehingga masyarakat dapat mandiri dalam mengembangkan usaha secara berkelompok.

Usaha ini hanya mampu membantu pada biaya lauk pauk sehari- harinya dikarenakan tingkat pendapatan usaha bertani tidak menghasilkan nilai besar serta pembagian pendapatan secara merata. Adapun kendala yang dihadapi Kelompok Usaha Bersama Sentosa adalah tanaman yang kurang memuaskan dikarenakan faktor lahan serta tata cara bertanam yang tidak sesuai dan perputaran panen yang lama. Namun Kelompok Usaha Bersama Sentosa tidak berhenti walaupun dengan keadaan seperti ini melainkan tetap menjalankan usaha dengan penuh sabar menunggu hasil.

Harapan dari kelompok sentosa adalah usaha ini tetap berjalan dan adanya kemajuan serta bantuan dari pemerintah untuk tetap mensuplai serta memberikan solusi dalam mengatasi kendala ini. Proses pengembangan usaha ini di dampingi dari Program Keluarga Harapan. Kelompok Usaha Bersama Makmur Desa Humene .

Kelompok usaha ini bernama Kelompok Usaha Bersama Sejahtera yang terdiri dari 9 peserta dengan jenis usaha yakni berkebun atau bertani jagung, sayur sayuran dan cabai, namun sekarang usaha yang dijalankan simpan pinjam dikarenakan beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi gagalnya bertani atau berkebun. Modal usaha yang diberikan berdasarkan kesesuaian jenis usaha yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tabel 5. Distribusi Narasumber Kelompok Usaha Bersama Makmur Desa Humene

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
1	Dahlia Laoli	Ketua	Perempuan	44 Tahun
2	Wirdania Gea	Sekretaris	Perempuan	30 Tahun
3	Nur Jalila Larosa	Bendahara	Perempuan	42 Tahun

4	Sabarnia Zebua	Anggota	Perempuan	36 Tahun
5	Nur Hasanah Gea	Anggota	Perempuan	34 Tahun
6	Wirdan Zebua	Anggota	Perempuan	42 Tahun
7	Rahmawati Aceh	Anggota	Perempuan	44 Tahun
8	Syamsidar Laoli	Anggota	Perempuan	39 Tahun

Berdasarkan tabel diatas, peserta kelompok berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai ibu rumah tangga dengan usia dari 30-44 tahun. Adapun hasil wawancara peneliti dengan kelompok pada tanggal 27 februari 2017 pukul 13.00 Wib yaitu Usaha berkebun atau bertani dari KUBE Makmur ini telah dikatakan Gagal dengan kendala yang dihadapi adalah faktor lahan yang tidak cocok untuk bertani dan tidak subur. Adapun kendala lainnya adalah cara menanam yang tidak sesuai dikarenakan tidak adanya pengalaman dan pengetahuan serta tidak adanya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat tentang bertani yang baik.

Kendala yang terjadi diatasi dengan mencoba bertani dilahan yang lain dan menanam tanaman lainnya, namun yang terjadi kegagalan lagi, dimana lahan yang digunakan adalah milik orang lain sehingga harus mengeluarkan biaya dalam penyewaan sedangkan pendapatan hasil panen tidak memadai. Hal ini, kelompok usaha bersama makmur memutuskan untuk memberhentikan bertani dan melanjutkan usaha yang lain yakni simpan pinjam, ungkap Ketua Kelompok Usaha Bersama Makmur.

Usaha simpan pinjam ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan dan manfaat yang dirasakan dapat membantu perekonomian baik biaya lauk pauk sehari – harinya, dan bahkan dapat membantu biaya sekolah. Modal usaha simpan pinjam ini berasal dari sisa modal yang diberikan pemerintah dan iuran anggota.

Harapannya usaha ini dapat berjalan dengan baik dan maju serta berhasil dalam kegiatan karena usaha ini dapat membentuk keakraban antara keluarga 1 dengan lainnya yang pada dasarnya tidak ada kaitan kuat dalam hubungan persaudaraan, inilah salah satu alasan kelompok usaha bersama makmur bertahan untuk melanjutkan program yang dicanangkan Pemerintah, ungkap Ketua KUBE Makmur.

Proses pendampingan dari Program Keluarga Harapan berkesan baik kepada kelompok, serta harapan dari kelompok agar pemerintah terus memperhatikan dan memberikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi selanjutnya. Dana tambahan usaha simpan pinjam dari kutipan keanggotaan yang senilai Rp. 10.000,- /bulannya.

Hasil Wawancara Pendamping Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH)

Kelompok Usaha Bersama dicanangkan oleh Kementrian Sosial melalui program keluarga harapan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bersifat berkelompok dengan mengembangkan usahanya secara bersama. Adapun hasil wawancara peneliti pada tanggal 10 maret 2017 pukul 09.00 wib yaitu proses sosialisasi yang dilakukan ditengah masyarakat dikatakan efektif dan optimal apabila dilaksanakan sesering mungkin dan disampaikan melalui media yang bervariasi antara lain penyampaian langsung kepada masyarakat, melalui musrembang, serta pemasangan spanduk-spanduk yang berkaitan dengan program. Namun hal tersebut tidak secara optimal dilaksanakan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami program ini.

Penyaluran bantuan dana secara langsung di kirimkan pada rekening kelompok melalui proses administrasi selama 5 bulan setelah pengajuan proposal kepada dinas sosial, dan dinas sosial meneruskan ke Kementrian Sosial kemudian kementrian sosial melakukan verifikasi. Jika verifikasi telah di setujui maka barulah dikirimkan dana tersebut pada rekening kelompok bersama pendamping, ungkap pendamping KUBE. Namun tidak adanya kendala pada penyaluran bantuan dana, dan adanya kesesuaian jenis usaha berdasarkan modal.

Pengawasan yang dilakukan harusnya secara rutin bersama aparat desa, dinas sosial dan pendamping, namun realitanya tidak dilaksanakan secara optimal. Sehingga kendala kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan usahanya tidak dapat diatasi secara cepat. Pendamping tidak dapat melaksanakan pengawasan secara optimal dikarenakan masa tugas yang diberikan hanya 6 bulan sedangkan program ini bersifat lama dan berkesinambungan bukan, ungkap pendamping KUBE.

Pada dasarnya terdapat kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kelompok usaha bersama ditengah masyarakat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, jiwa wirausaha yang minim, kondisi geografis tidak mendukung, kurangnya sarana dan prasarana serta dukungan daerah masih rendah. Kendala kendala ini sebisa mungkin dapat diatasi oleh pendamping, namun tidak secara optimal dikarenakan adanya pihak lain yang berperan penting dalam proses penerapan ini.

Harapannya program ini bukan hanya sekedar terlaksana namun harusnya adanya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat masih membutuhkan peran pemerintah yang bukan hanya sekedar memberikan bantuan saja melainkan mengikuti proses perkembangan. Harapan selanjutnya adalah adanya stimulan yang efektif serta melanjutkan pendampingan ketika pendamping kube habis masa tugas, karena masyarakat masih membutuhkan pendampingan.

Hasil Wawancara Kepala Desa Humene

Pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita- citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisonal menjadi masyarakat yang modern). Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa pada tanggal 7 maret 2017 pukul 11.00 wib bertepatan di rumah kepala desa adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang saat ini diterima tidak sesuai dengan kronologi dilapangan. Bantuan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal dan tidak merata penerimaannya bahkan sekitar 60% masyarakat belum menerimanya, hal ini terkendala pada pemerintah.

Program kelompok usaha bersama di Desa Humene secara umum tidak dapat membantu peningkatan pembangunan masyarakat desa namun secara khusus hanya mampu menambah ekonomi yang tidak optimal. Kepala desa hanya berperan sebagai pendampingan dan tidak terlalu ambil alih. Dukungan yang diberikan kepala desa kepada kelompok yaitu penginputan data, motivasi dan kendala-kendala lainnya yang dihadapi kelompok namun tidak secara penuh.

Harapannya kelompok usaha bersama ini tetap berjalan dengan baik, adanya kemajuan serta peran pemerintah sangat diharapkan agar kendala- kendala yang terjadi dapat diatasi sebagaimana mestinya, ungkap kepala desa.

Adapun pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kelompok usaha bersama memiliki kendala dalam pelaksanaan, hal ini menjadi objek penulis pada penelitian dengan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam meningkatkan pembangunan masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi?

Pertanyaan diatas dapat dilihat dari hasil wawancara yang pada dasarnya pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak berjalan secara optimal. Menurut kelompok masyarakat, peran pemerintah sangat penting dikarenakan kendala yang dihadapi tidak mampu diatasi oleh satu pihak melainkan semua pihak yang berkaitan ikut andil dalam pemecahan kendala ini.

Kendala yang dihadapi pada setiap kelompok usaha bersama (KUBE) dengan usaha bertani adalah lahan yang tidak memadai dan tidak mendukung yang dimana lahan bertani di

daerah pinggiran pantai, kurangnya sarana dan prasarana serta tata cara bertani. Hal ini yang mengakibatkan gagalnya usaha, yang merupakan cara untuk membantu perekonomian keluarga.

Dalam pelaksanaan observasi di lapangan, diperoleh gambaran bahwa kelompok masyarakat memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapai perubahan dalam peningkatan taraf kehidupan dengan mempergunakan modal yang diberikan pemerintah sebaik mungkin. Pengamatan peneliti, kelompok masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif ini bila dibandingkan kelompok masyarakat di desa lainnya bahwa modal yang diberikan pemerintah bukan untuk usaha melainkan pembagian rata terhadap kelompok. Hal ini, peneliti ketahui dari pendamping desa lainnya yang kewalahan pada pelaporan program.

Upaya yang dilakukan kelompok usaha bersama Desa Humene ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pembangunan desa dikarenakan kemauan yang tinggi, maka dalam hal ini jika pihak pemberi manfaat tidak mendukung dalam pengawasan dan evaluasi mengakibatkan kegagalan dan sikap antisipasi yang timbul dari masyarakat.

KESIMPULAN

Pelayanan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur melainkan kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan pada Desa Humene yakni kelompok usaha bersama (KUBE) melalui program keluarga harapan kepada keluarga miskin yang pada dasarnya membantu perekonomian. Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang, serta saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sesuai dengan ketentuannya KUBE merupakan kumpulan keluarga miskin yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan. Pelayanan kesejahteraan sosial suatu kegiatan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dialami individu, kelompok, keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial volume III*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Febrianti, Pipit. 2014. *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ginting, Prof. Dr.I.H.Meneth. 2006. *Pembangunan Masyarakat Desa (sebuah refleksi)*. Cetakan I. Medan : USU Press
- Iskandar, A.Dr,Drs,Msi. 2012. *Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan (suatu studi kearah penggunaan indikator tunggal)*. Cetakan Pertama. Bogor : Penerbit IPB Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung

- Mustafa, Andi Azhar. 2014. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin. Skripsi. Univesitas Hasanuddin, Makasar.
- Neuman, William Lawrence. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach. USA: Pearson
- Pujileksono, Sugeng. 2015. Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Malang. Setara Press
- Sjafari, Agus. 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok . Cetakan 1.Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Soetomo. 2010. Pembangunan Masyarakat. Cetakan III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Yuwono, Teguh.2001. Manajemen Otonomi Daerah. Semarang : CLOGAPPS.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1981, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin